

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

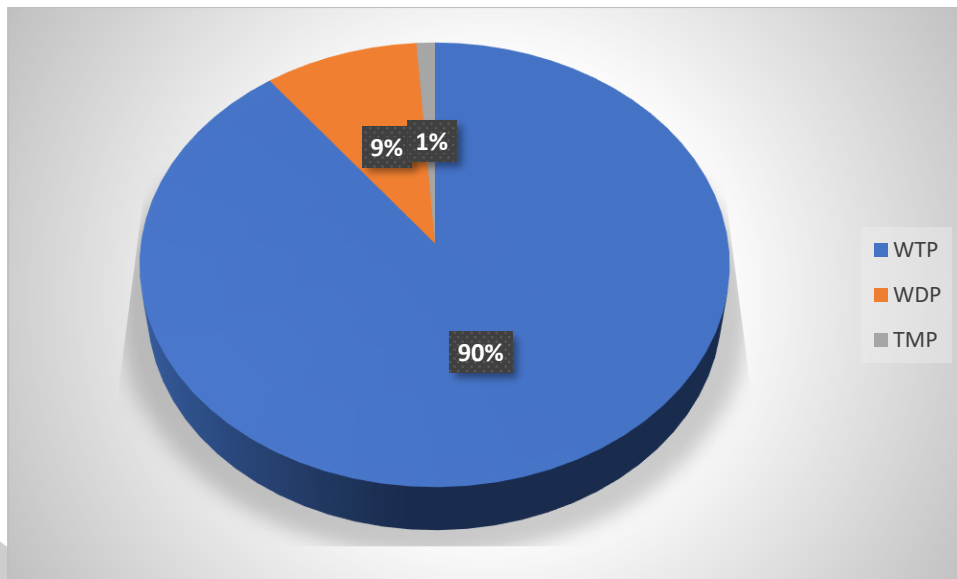
Di masa kini, masyarakat memiliki tuntutan yang lebih besar kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar lebih mengedepankan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bagaimana suatu kinerja dalam organisasi.

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 20 menyebutkan, asas transparansi menjadi salah satu asas umum dari penyelenggaraan pemerintah. Transparansi adalah apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, informasi keuangan dapat diberikan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat juga mempunyai berhak mengetahui secara menyeluruh bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dayanya dan ketaatan terhadap perundang-undangan

Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dilihat melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan begitu penting, karena dari laporan keuangan bisa memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah dan kondisi ekonomi pemerintah sekaligus memonitor kinerja pemerintahan. Adanya laporan keuangan juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk pengembangan daerah di masa depan.

PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan akan mendapat penilaian berupa opini audit. Ada 4 opini audit yang dikeluarkan BPK, WDP (wajar dengan pengecualian), WTP (wajar tanpa pengecualian), TMP (tidak memberikan pendapat) dan TW (tidak wajar). Laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, maka membuktikan jika laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar.

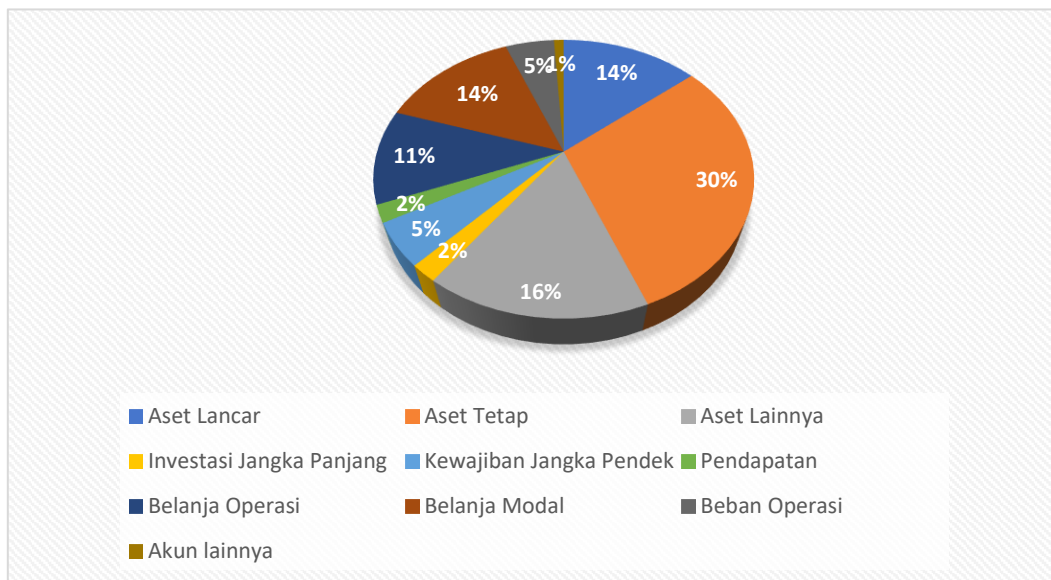
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2021 menyatakan hasil pemeriksaan atas 542 LKPD (34 Provinsi, 415 Kabupaten, 93 Kota) Tahun 2019, opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Dari hasil tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan saat menyusun LKPD. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan opini WTP sebesar 8%. LKPD Tahun 2018, ada 443 dari 542 LKPD yang mendapat opini WTP (82%), sementara itu LKPD Tahun 2019 ada 485 dari 542 LKPD yang mendapat opini WTP (90%).



Gambar 1.1 Opini BPK atas LKPD Tahun 2019

Sumber: IHPS I Tahun 2020

Opini LKPD mengalami perbaikan selama lima tahun terakhir (2015-2019). Dalam periode tersebut, opini WTP atas LKPD tahun 2015 yaitu 58%, naik sebesar 32% pada LKPD tahun 2019 menjadi 90%. Sedangkan, terjadi penurunan opini TMP sebesar 4% dari 5% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 1% pada LKPD Tahun 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPD tahun 2019, terdapat masalah yang terjadi saat menyusun laporan keuangan, yaitu banyak ketidaksesuaian saat pencatatan akun-akun dengan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangan, seperti jumlah saldo di laporan keuangan yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak bisa ditelusuri keberadaannya.

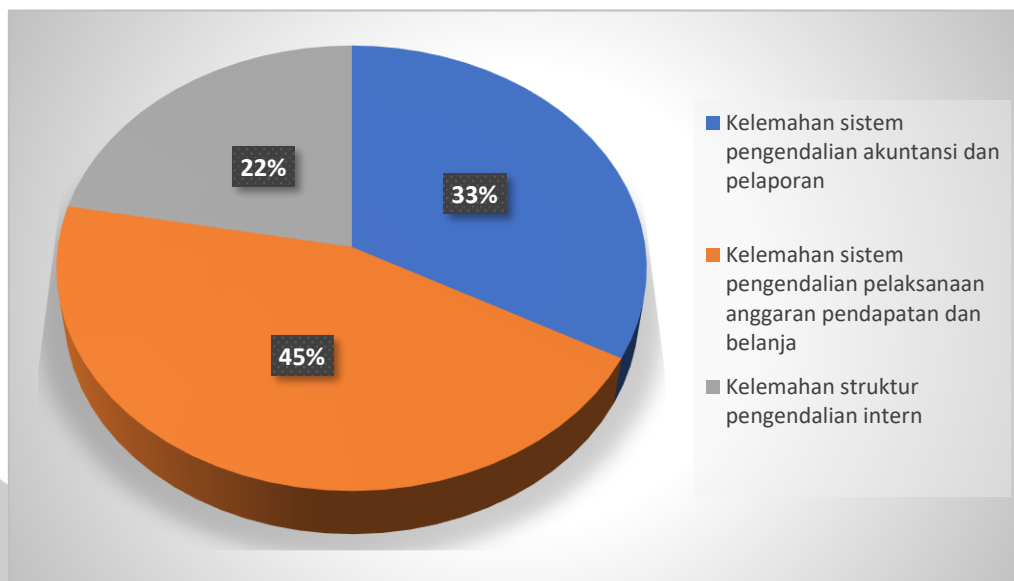


Gambar 1.2 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2019

Sumber: IHPS 1 2020

Permasalahan terbesar ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP terdapat di akun aset tetap. Permasalahan ini disebabkan oleh aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan ketidakakuratan dalam pencatatan aset tetap. Permasalahan selanjutnya juga terdapat di akun aset lainnya. Permasalahan disebabkan karena aset lainnya yang tidak diketahui keberadaannya dan belum dilakukan perhitungan masa manfaat dan amortisasi dari aset tidak berwujud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat 5.175 kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri dari permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan karena pencatatan yang belum dilakukan atau pencatatan yang tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 1.729 (33%). Ditemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.338 (45%), dan permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern karena peraturan atau SOP belum disusun atau tidak lengkap sebanyak 1.108 (22%).



Gambar 1.3 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

Sumber: IHPS 1 Tahun 2020

Aspek yang penting dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sumber daya manusia. Ebbert & Griffin (2010) menjelaskan jika keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusianya dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menciptakan laporan keuangan pemerintahan yang lebih baik, yaitu diikuti sumber daya yang juga kompeten dalam pembuatan laporan. Penelitian Sukmaningrum (2012) menyatakan, kualitas informasi 5 laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan penelitian Sudiarti & Juliarsa (2020) menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia ini memberikan dampak yang positif kepada kualitas laporan keuangan.

Faktor lain dalam mempengaruhi kualitas suatu laporan dilihat dari pemanfaatan teknologi. Selain mempunyai sumber daya manusia yang kompeten, juga harus bisa menguasai teknologi. Syam (2015) menyatakan, nilai informasi yang tidak didukung dengan pemanfaatan teknologi, dapat menghambat dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berupa ketepatan waktu. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

menyebutkan kewajiban dalam memanfaatkan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah telah berusaha dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah, agar kualitas dari laporan keuangan semakin meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan paham akan teknologi dan sistem akuntansi keuangan daerah. Anwar & Mukadarul (2016) menunjukkan jika penggunaan teknologi informasi memberikan dampak yang positif kepada kualitas laporan keuangan pada suatu daerah. Dan pada hasil penelitian Agung & Gayatri (2018) menyebutkan jika pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang signifikan positif dengan kualitas suatu laporan keuangan.

Selain manusia yang berkompeten dan bisa menguasai teknologi informasi, juga dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat. PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan terdapat beberapa kebijakan dalam pengendalian internal yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai jika penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah Armando (2013). Pada penelitian Widyaningtyas (2014) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern memberikan dampak yang negatif juga tidak signifikan kepada kualitas laporan keuangan. Lalu menurut Agung & Gayatri (2018) memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, maka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pemerintah harus menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. Pada PP No. 24 tahun 2005, menyebutkan jika standar akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan haruslah mengacu kepada SAP yang sudah ditetapkan, karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada dalam standar

akuntansi yang berlaku. SAP juga sebagai acuan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang terkandung sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian Elfauzi (2019) menyatakan jika standar akuntansi pemerintah tidak memberikan pengaruh kepada kualitas dari suatu laporan keuangan. Sebaliknya menurut Yaqin & Jatmiko (2018), standar akuntansi pemerintah memiliki dampak yang positif kepada kualitas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya bisa dikatakan sudah sangat baik. Hal tersebut dilihat dari opini yang dikeluarkan BPK terhadap LKPD Kota Surabaya selama 9 tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<https://surabaya.go.id/id/berita/60140/pemkot-surabaya-pertahankan-opi>). Opini WTP dari BPK ini membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya sudah berkualitas dan sudah diakui kewajarannya. Kemampuan Kota Surabaya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari (BPK) selama 9 tahun berturut-turut tentu menarik untuk dipelajari.

Jika dilihat menurut latar belakang yang ada dan juga fenomena yang ada, maka topik penelitian tentang kualitas laporan keuangan ini sangat menarik karena banyak fenomena yang ditemukan terkait topik tersebut. Dan juga dari fenomena yang ada menandakan masih banyak wilayah di Indonesia yang laporan belum maksimal dalam menyusun laporan keuangannya. Dilakukannya penelitian ini karena termotivasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah Kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan.
4. Mengalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan



## 1.4 Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan apa saja yang menjadi faktor dalam mempengaruhi kualitas suatu laporan.

### b) Manfaat Praktis

- Untuk peneliti : Dapat menambah pengetahuan sekaligus memahami tentang kualitas suatu laporan lebih lanjut.
- Untuk pemerintah : Bisa dijadikan masukan untuk pemerintah agar terus mengembangkan daerahnya di masa depan

## 1.5 Sistematika Penulisan Proposal

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat adanya penelitian tujuan adanya penelitian, dan juga sistematika penulisan proposal.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan tinjauan pustaka berisi teori yang mendukung penelitian dan perumusan hipotesis

### BAB III Metode Penelitian

Berisi teknik penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel

### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang akan dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan memakai software WarpPLS 7.0 beserta pembahasan.

## BAB V Penutup

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dalam peneliti yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, di dalam bab ini juga berisikan mengenai keterbatasan dalam penelitian sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

